



Laporan Kinerja

LPMP Provinsi Jawa Tengah

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah, berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2021. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban LPMP Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan anggaran serta pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 antara kepala LPMP dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021, LPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua sasaran kegiatan dengan lima indikator kinerja kegiatan.

Laporan kinerja ini diharapkan menjadi media publikasi capaian kinerja yang dihasilkan LPMP Provinsi Jawa Tengah ke masyarakat selama pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian target, program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penjaminan mutu serta peningkatan kinerja LPMP Provinsi Jawa Tengah di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Semarang, Januari 2022

Pt. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah,



Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

NIP. 196001051985031004



DAFTAR ISI

Laporan kinerja terbagi empat bab mulai dari bab pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup

iii KATA PENGANTAR **iv** DAFTAR ISI **v** IKHTISAR EKSEKUTIF

1 BAB I PENDAHULUAN

- 2 A. Gambaran Umum
- 4 B. Dasar Hukum
- 5 C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 6 D. Permasalahan/Isu Strategis

10 BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 11 Ringkasan Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2021

14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 15 A. Capaian Kinerja
- 48 B. Realisasi Anggaran

51 BAB IV PENUTUP

- 53 **Lampiran**
 - Perjanjian Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
 - Pernyataan telah direviu

IKHTISAR EKSEKUTIF

SATKER WBBM (2020)



Pengelolaan BMN
Terbaik (2019)



E-SKP Terbaik
(2019)



SAKIP Terbaik
(2020)



Unit Layanan Terpadu
Terbaik (2019)



Terbaik III E-Kehadiran
(2018)



Capaian Kinerja SPI
Terbaik (2018)



Predikat A
Akuntabilitas Kinerja (2019)



Terbaik III E-SKP
(2018)



Peringkat III
Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2016 Kategori Pagu
Rp 1 Milyar – 1 Triliun (2017)



SATKER WBK
(2017)

Laporan kinerja LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 menyajikan pencapaian dua sasaran kegiatan dengan lima indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. Tingkat ketercapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Berikut ringkasan capaian kinerja selama tahun 2021.

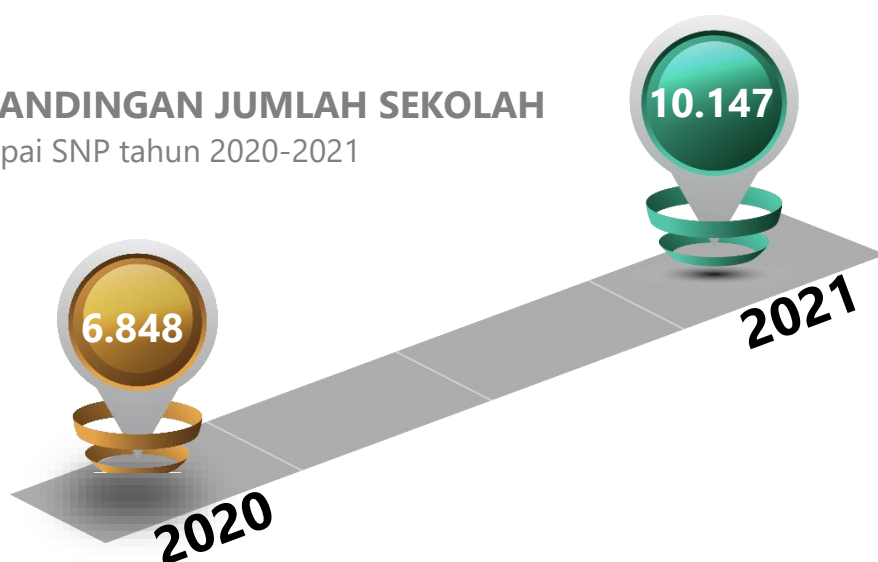
TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1

“meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

Berdasarkan hasil analisis data audit mutu pendidikan tahun 2021, mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah sekolah yang mencapai SNP. Terdapat penambahan sebanyak 3.299 sekolah yang mencapai SNP di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020). Pada tahun 2020 sendiri ada 6.848 sekolah yang mencapai SNP meningkat menjadi 10.147 sekolah yang mencapai SNP pada audit akhir di tahun 2021.

PERBANDINGAN JUMLAH SEKOLAH

mencapai SNP tahun 2020-2021

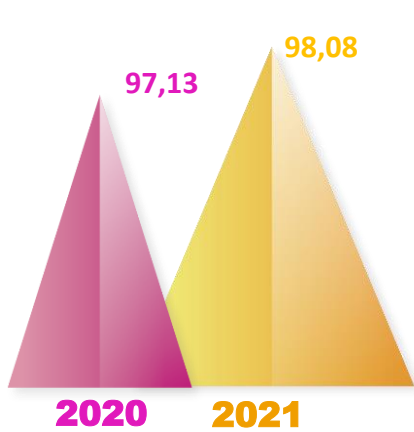


TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2

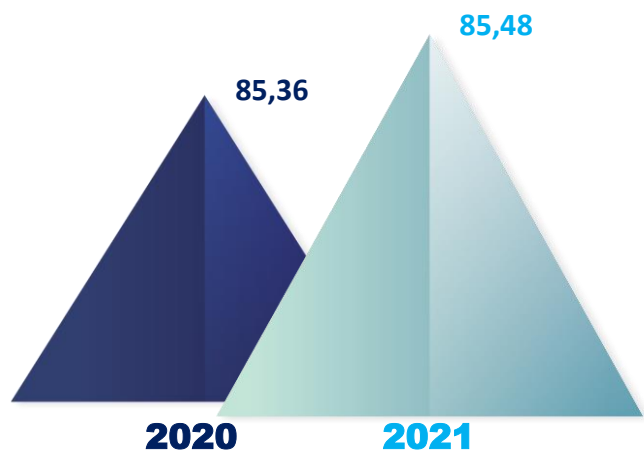
“meningkatnya tata kelola LPMP”

Pengelolaan organisasi di LPMP Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bukti lain tatakelola di LPMP Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan tata kelola antara lain dengan meningkatnya nilai Akuntabilitas atas nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L. (lihat grafik dibawah)



Nilai Kinerja Anggaran
LPMP Provinsi Jawa Tengah 2020-2021



Nilai Akuntabilitas kinerja
LPMP Provinsi Jawa Tengah 2020-2021

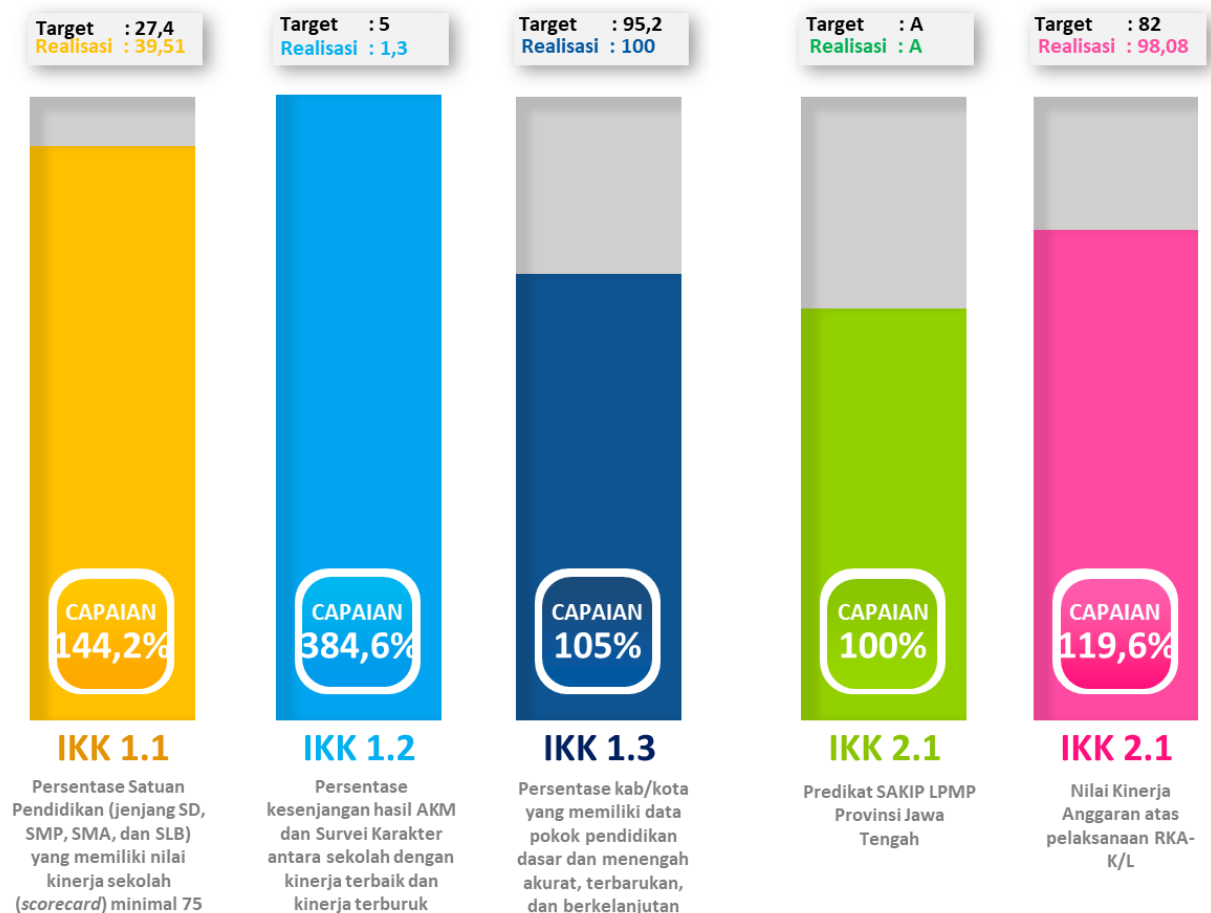
Berikut ringkasan pencapaian 5 indikator kinerja kegiatan selama tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 1

“meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

SASARAN KEGIATAN 2

“meningkatnya tata kelola LPMP”



Dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap **Rp33.379.873.475,-** dari total **Rp34.054.314.000,-** dengan persentase **98,02%**.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Belum terpenuhinya secara maksimal 8 standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan seperti pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan;
2. Rendahnya kemampuan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang berorientasi literasi, numerasi, dan pengembangan profil Pelajar Pancasila;
3. Keterbatasan kemampuan guru dalam penggunaan *platform* pembelajaran berbasis teknologi informatika;
4. Rendahnya pengawasan dan komitmen kepala sekolah terhadap data yang diinput dalam DAPODIK;
5. kondisi lingkungan sekolah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif;
6. Lambatnya ketersediaan data rapor mutu pendidikan dari pusat, mengakibatkan sekolah tidak mempunyai data yang akurat untuk menyusun rencana pemenuhan/peningkatan mutu;
7. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya dalam proses belajar mengajar.

Upaya yang telah dilakukan LPMP Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan pendampingan, supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan yang capaian SNP rendah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya terkait dengan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter dan lingkungan belajar;
2. Bimbingan teknis fasilitasi pemenuhan mutu pembelajaran baik daring dan tatap muka;
3. pendampingan dan supervisi pemenuhan mutu pembelajaran baik secara daring dan tatap muka;
4. Sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pemanfaatan akun belajar.id;
5. Melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru kepada sekolah dan dinas pendidikan;
6. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan operator Dapodik untuk mendorong pengisian Dapodik secara valid;
7. Melakukan verifikasi dan validasi ke satuan pendidikan terkait Dapodik;
8. Mengembangkan inovasi penjaminan mutu pendidikan berbasis audit mutu untuk membantu sekolah melakukan evaluasi diri sekolah.

BAB I PENDAHULUAN



Subsistem Sistem
Anti Korupsi
ZONA INTEGRITAS
Wilayah Bebas Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih

WIB

A. Gambaran Umum

LPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Eselon II Kemendikbudristek di bawah pembinaan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. LPMP Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Sejak Juli 2021 LPMP Prov. Jateng dipimpin oleh Plt. Kepala, yaitu Ibu Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

SEJARAH LPMP PROV. JATENG



1977

Balai Penataran Guru
(Kepmendikbud RI No
0116/O/1977)

LPMP Prov. Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Permendiknas No. 07 Tahun 2007. Sebelum keputusan tersebut terbit, LPMP Provinsi Jawa Tengah bernama Balai Penataran Guru (BPG) Semarang.



2003

Lembaga Penjamin
Mutu Pendidikan
(Kepmendikbud
RI No 087/O/2003)

2008

LPMP (eselon II)
(Kepmendikbud RI No
66/2008)



2020

LPMP
(Permendikbud No
26 Tahun 2020)



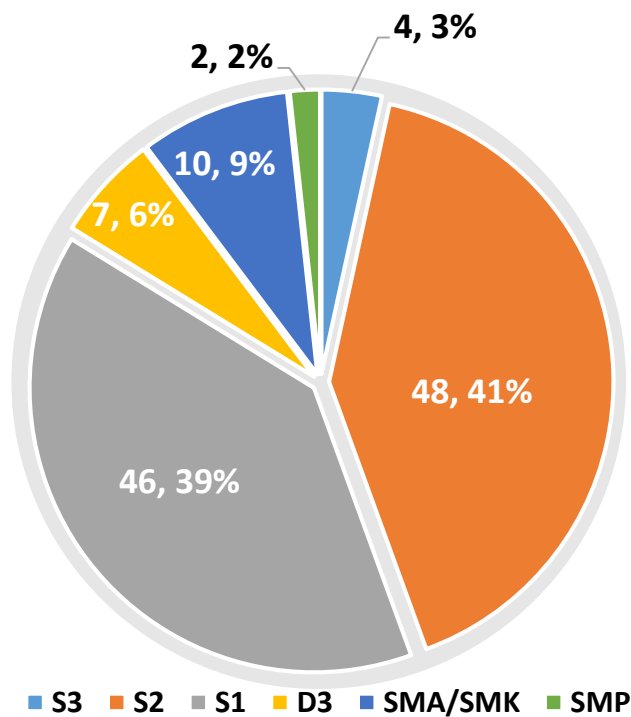
2007

LPMP (eselon III)
(Kepmendikbud RI No
07/O/2007)

GAMBARAN SDM LPMP PROVINSI JAWA TENGAH

Pada tahun 2021, LPMP Provinsi Jawa Tengah mempunyai total 149 pegawai, terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional yaitu Widyaprada dan Pengembang Teknologi Pembelajaran, jabatan pelaksana dan PPNPN.

SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



SDM Berdasarkan Jabatan



BEBAN KERJA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH



B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
4. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kemendikbud.

C. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi



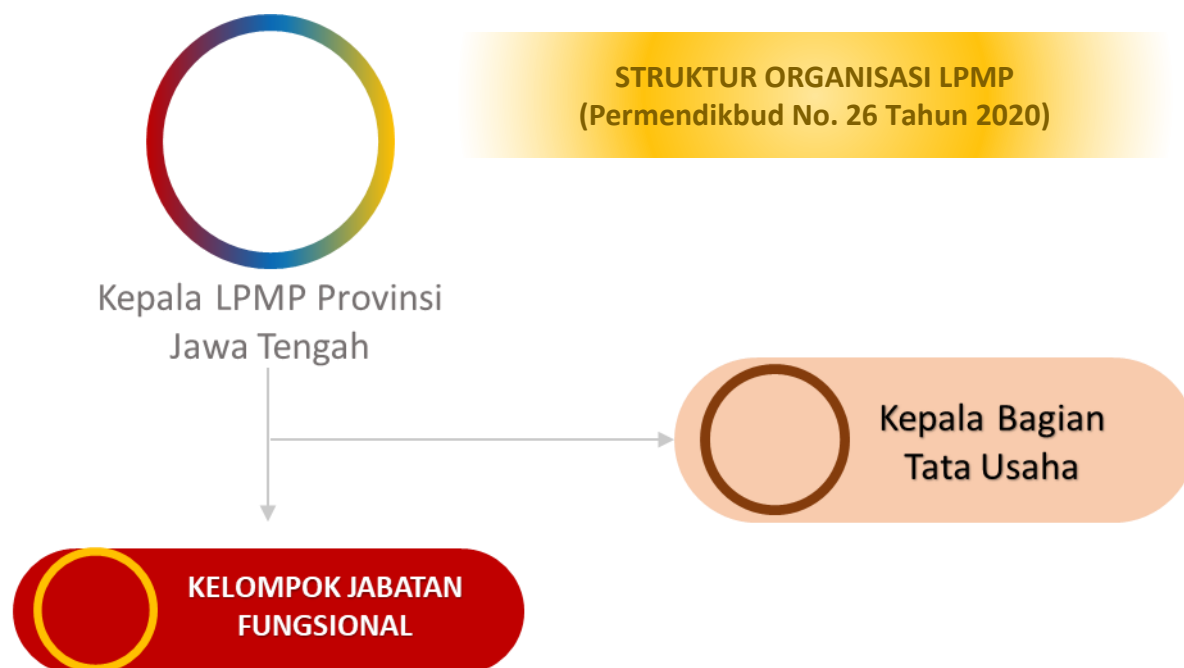
Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS LPMP Provinsi Jawa Tengah



- a. Pemetaan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Pelaksanaan supervisi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penjaminan mutu nasional;
- d. Pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara nasional;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

LPMP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala, dengan dibantu satu pejabat Struktural eselon III, dan Kelompok Jabatan fungsional.



D. Permasalahan/Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada saat ini dan lima tahun ke depan antara lain:

1) Terbatasnya jumlah satuan pendidikan dengan kategori "SNP"

Hasil pemetaan tahun 2019 menunjukkan, Rata-rata capaian SNP satuan pendidikan di provinsi Jawa Tengah berada pada kategori "menuju SNP level 4". Jumlah satuan pendidikan yang berada pada kategori "SNP" yaitu sebanyak 8.404 sekolah dari total 24.753 sekolah dengan persentase 33,95%. (lihat tabel)

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah dengan kategori "SNP"	%
1	SD	18.953	6.677	35,23%
2	SMP	3.348	1.021	30,50%
3	SMA	864	281	32,52%
4	SMK	1.588	425	26,76%
	Total	24.753	8.404	33,95%

(sumber: Laporan Kinerja LPMP Jateng 2019)

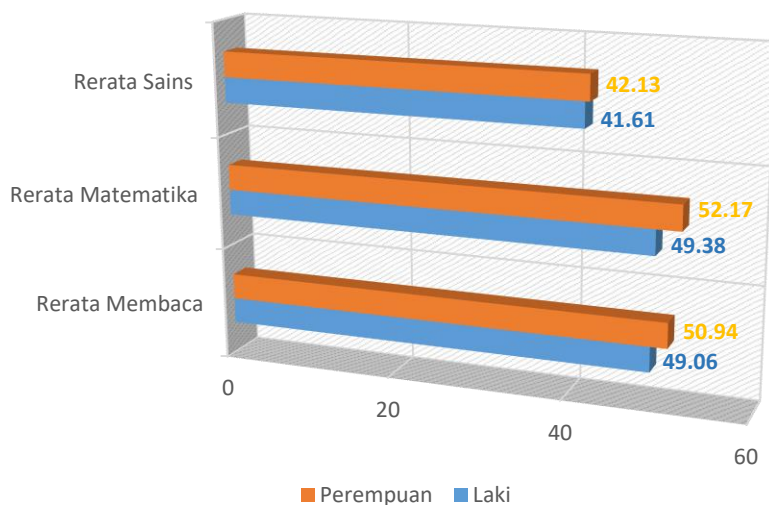
2) Kompetensi literasi, numerasi, dan karakter siswa masih perlu ditingkatkan.

Literasi dan *numerasi* merupakan kompetensi dasar yang penting bagi siswa. *Literasi* dan *numerasi* sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan menggunakan angka-angka dalam berbagai konteks baik personal, sosial maupun profesional. Kemampuan literasi, numerasi siswa di Provinsi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

Berikut gambaran nilai Bahasa Indonesia, Matematika dan Sains Provinsi Jawa Tengah yang bersumber survei Assemen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) tahun 2019.

Survei AKSI tahun 2019 yang dilakukan Pusat Penilai Pendidikan

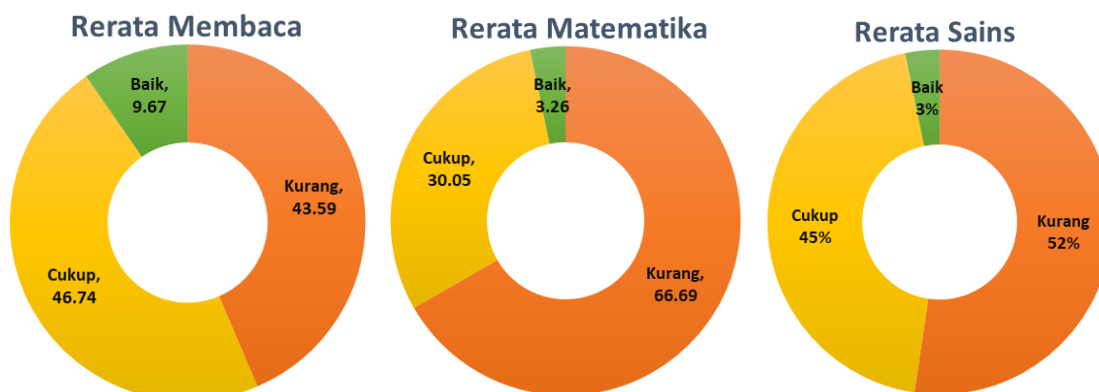
Capaian AKSI SMP 2019 Provinsi Jawa



(sumber: <http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id>)

Kemendikbud pada siswa SMP menunjukkan rerata nilai membaca dan matematika masih rendah. (lihat grafik disamping)

Capaian AKSI SMP 2019 Provinsi Jawa Tengah (dalam %)



(sumber: <http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id>)

Persentase murid yang mengalami perundungan (*bullying*) di Indonesia tahun 2018 mencapai 41,1% (sumber: *Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) dalam riset Programme for International Students Assessment (PISA) pada Tahun 2018*). Angka tersebut menjadikan sebagai negara peringkat 5 dari 78 negara di dunia.

3) Kualitas data pokok pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Data pokok Pendidikan (Dapodik) yang memuat data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data substansi Pendidikan dan data sarana prasarana merupakan yang berguna sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Kualitas Dapodik ditentukan oleh tiga indikator yaitu akurat, berkelanjutan dan terbarukan.

Sesuai data rapor mutu Dapodik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dihimpun oleh direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, kualitas Dapodik belum mencapai 100%. Untuk itu pemerintah mendorong semua sekolah melalui pemerintah daerah untuk melakukan input data secara akurat (wajar dan benar), melakukan sinkronisasi secara berkelanjutan, dan pemutakhiran data secara berkala.

Peran Strategis LPMP Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, LPMP Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam tata Kelola kelembagaan. Peran strategis LPMP Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

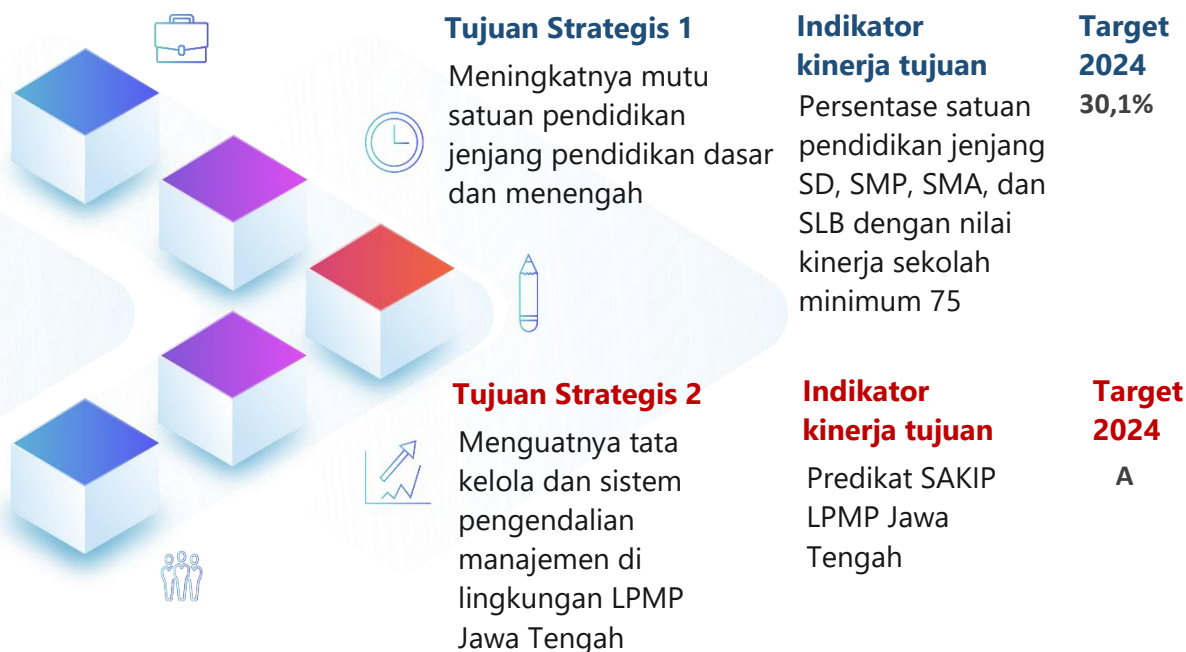
1. Mitra penting bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam membantu pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan sekolah;
2. Mitra penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya;
3. Mengawal pelaksanaan kebijakan Kementerian di Provinsi Jawa Tengah agar berjalan sukses;
4. Sebagai *role model* bagi UPT lain dalam pelaksanaan tata kelola kelembagaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



LPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.



Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
	IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5	5	5	5
	IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2	95,4	95,6	95,8
2. Meningkatnya tata kelola LPMP	IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah	A	A	A	A	A
	IKK 2.1 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	81	82	83	84	85

PERJANJIAN KINERJA AWAL

LPMP PROVINSI JAWA TENGAH 2021

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan



IKK #1.1

Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75

27,4%

IKK #1.2

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

5%

IKK #1.3

Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan

95,2%

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya tata kelola LPMP

IKK #2.1

Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah

A

IKK #2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

82

ANGGARAN LPMP PROVINSI JATENG TAHUN 2021

Rp41.629.538.000

PERJANJIAN KINERJA REVISI

LPMP PROVINSI JAWA TENGAH 2021

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

IKK #1.1

Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75

27,4%

IKK #1.2

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

5%

IKK #1.3

Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan

95,2%

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya tata kelola LPMP

IKK #2.1

Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah

A

IKK #2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

82

ANGGARAN LPMP PROVINSI JATENG TAHUN 2021

Rp34.054.314.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, LPMP Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua sasaran dengan lima indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2021.

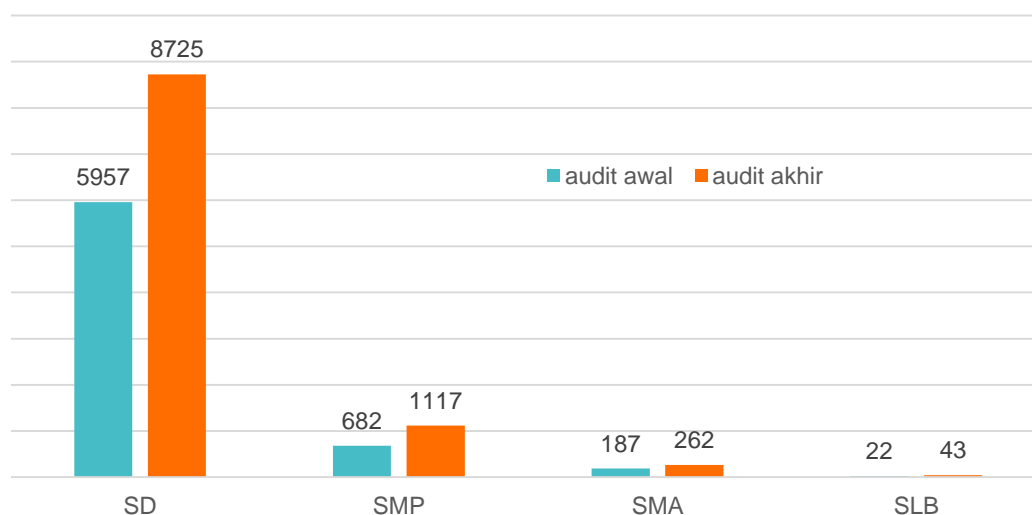


SASARAN KEGIATAN 1

“Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

Sesuai hasil pemetaan audit mutu, penjaminan mutu pendidikan tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah sekolah dengan indeks mutu lebih dari 75. **Sesuai audit awal di tahun 2021, jumlah sekolah dengan indeks mutu lebih dari 75 sebanyak 21.374 sekolah meningkat menjadi 22.574 sekolah pada audit akhir di tahun 2021.** Selain itu, peningkatan penjaminan mutu tersebut juga terlihat dari meningkatnya jumlah sekolah yang mencapai SNP. **Sesuai audit awal di tahun 2021, ada 6.848 sekolah yang mencapai SNP meningkat menjadi 10.147 sekolah yang mencapai SNP pada audit akhir di tahun 2021.** Peningkatan jumlah sekolah yang mencapai SNP ditunjukkan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB sesuai grafik dibawah ini.

PENINGKATAN JUMLAH SEKOLAH YANG MENCAPAI SNP PER JENJANG PROVINSI JAWA TENGAH 2021*



*Sumber data: audit mutu pendidikan oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah



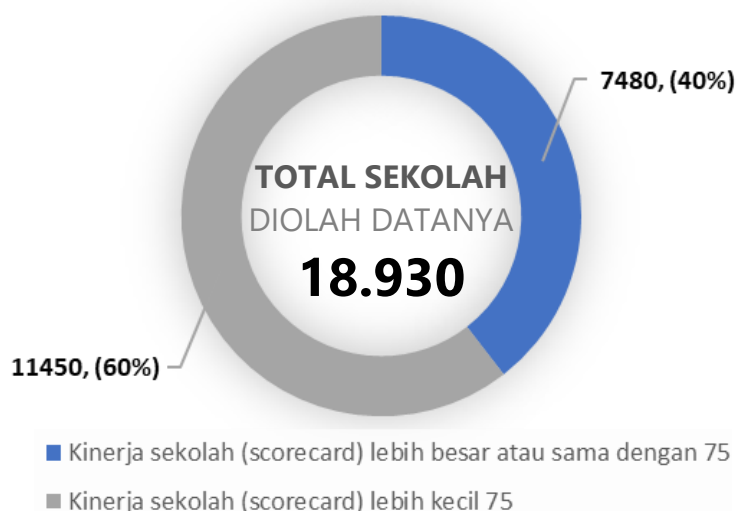
Indikator Kinerja #1

Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75



*Sumber data: Setditjen PAUD Dikdasmen

Pengukuran nilai kinerja sekolah (*scorecard*) menggunakan rapor mutu 2020. Digunakannya data rapor mutu 2020 karena rapor mutu 2021 belum dapat dianalisis. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim rapor mutu dari Setditjen PAUD Dikdasmen, ada sebanyak 39,51% atau 7.480 sekolah dari total sekolah yang analisis datanya sebanyak 18.930 sekolah yang capaian nilai kinerja sekolah (*scorecard*) nya ≥ 75 . Perlu diketahui bahwa nilai kinerja sekolah sebesar 75 itu setara dengan nilai/indeks 6 dalam indeks mutu pendidikan.



Dari data capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.1 capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 27,4% berhasil terealisasi sebesar 39,51% dengan persentase capaian sebesar 144,2%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian untuk

tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 6,55 poin. Penurunan ini dimungkinkan disebabkan oleh: 1) adanya penurunan jumlah sekolah yang mengirimkan data pada aplikasi rapor mutu. Pada tahun 2019 jumlah sekolah yang mengirimkan data ke rapor mutu sebanyak 20.270 sekolah, sedangkan pada tahun 2020 hanya 18.930 sekolah saja yang mengirimkan; 2) adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, maka capaian untuk tahun 2021 tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Dengan persentase capaian sebesar 131% (lihat tabel di atas).

Berikut rata-rata indeks mutu SNP untuk masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

RATA-RATA CAPAIAN SNP PER KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH 2021*

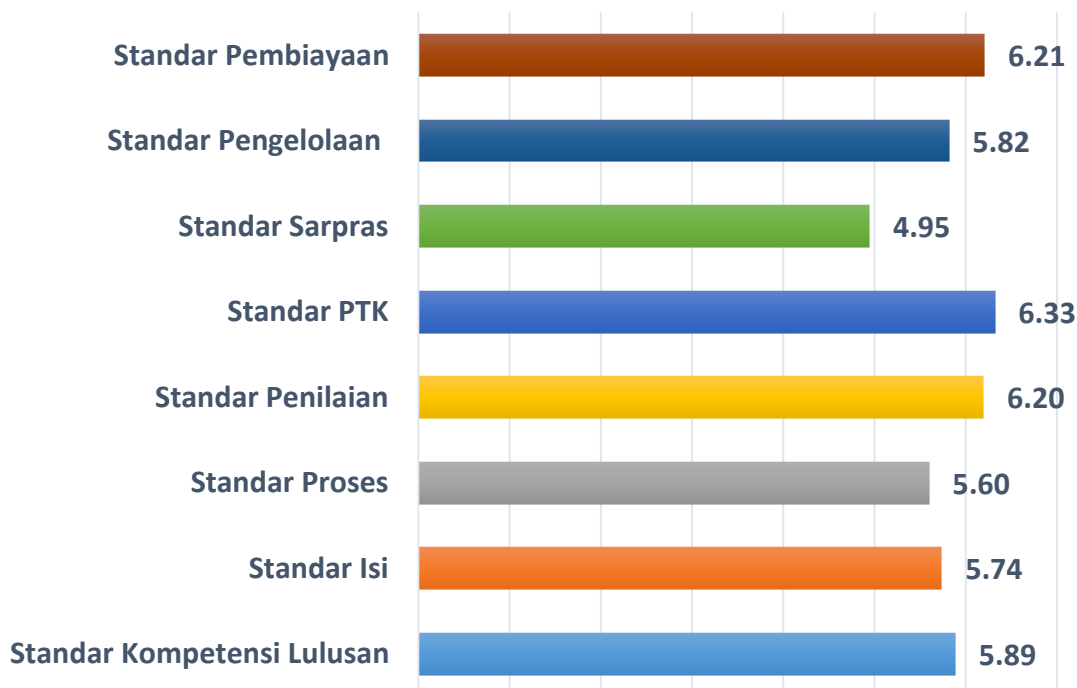
Kabupaten/Kota	Jenjang				Total
	SD	SMP	SMA	SLB	
Kab. Banjarnegara	5.79	5.87	6.07	6.28	5.81
Kab. Banyumas	5.80	5.82	6.02	4.00	5.81
Kab. Batang	5.72	5.84	5.91	6.25	5.75
Kab. Blora	5.79	5.70	5.91	5.58	5.78
Kab. Boyolali	5.88	5.78	5.91	5.35	5.86
Kab. Brebes	5.88	5.92	5.85	5.08	5.88
Kab. Cilacap	5.90	5.81	5.99	5.31	5.89
Kab. Demak	5.84	5.87	5.91	6.22	5.85
Kab. Grobogan	5.87	5.75	5.82	4.91	5.85
Kab. Jepara	5.83	5.73	5.85	6.29	5.81
Kab. Karanganyar	5.94	6.04	5.99	4.89	5.93
Kab. Kebumen	5.87	5.87	5.98	6.24	5.87
Kab. Kendal	5.85	5.91	5.88	6.21	5.86
Kab. Klaten	5.92	5.91	6.17	5.27	5.92
Kab. Kudus	6.00	5.94	5.77	4.46	5.97
Kab. Magelang	5.94	5.80	5.80	4.69	5.91
Kab. Pati	5.88	5.88	5.99	6.26	5.89
Kab. Pekalongan	5.75	5.91	5.67	4.00	5.76
Kab. Pemalang	5.76	5.75	5.69	6.25	5.76
Kab. Purbalingga	5.79	5.79	6.04	6.24	5.80

Kabupaten/Kota	Jenjang				
	SD	SMP	SMA	SLB	Total
Kab. Purworejo	5.95	5.80	5.90	6.23	5.93
Kab. Rembang	5.83	5.84	5.83	4.68	5.82
Kab. Semarang	5.81	5.97	5.78	5.28	5.82
Kab. Sragen	5.85	5.73	5.83	5.34	5.82
Kab. Sukoharjo	5.81	5.73	5.94	5.80	5.81
Kab. Tegal	5.77	5.91	5.96	-	5.79
Kab. Temanggung	5.71	5.81	5.73	6.27	5.72
Kab. Wonogiri	5.90	5.94	6.04	6.00	5.91
Kab. Wonosobo	5.59	5.59	5.95	6.15	5.60
Kota Magelang	5.87	6.04	5.97	5.14	5.87
Kota Pekalongan	5.93	6.04	5.68	5.15	5.94
Kota Salatiga	5.96	6.13	6.25	3.99	5.97
Kota Semarang	5.98	5.94	6.02	6.10	5.98
Kota Surakarta	5.95	5.99	6.14	6.08	5.98
Kota Tegal	5.98	5.96	6.06	-	5.98
Prov. Jawa Tengah	5.85	5.84	5.93	5.57	5.85

Berikut gambaran indeks mutu SNP Provinsi Jawa Tengah dilihat dari 8 standar nasional pendidikan pada masing-masing jenjang berdasarkan data rapor mutu tahun 2020.

RATA-RATA CAPAIAN SNP PER STANDAR

PROVINSI JAWA TENGAH 2021



RATA-RATA CAPAIAN SNP PER STANDAR

PER JENJANG

	SD	SMP	SMA	SLB
Standar Kompetensi Lulusan	5.91	5.75	6.04	5.04
Standar Isi	5.77	5.65	5.50	5.70
Standar Proses	5.61	5.46	5.64	6.77
Standar Penilaian	6.27	5.93	6.09	4.63
Standar PTK	6.29	6.49	6.54	6.66
Standar Sarpras	4.87	5.33	5.37	5.18
Standar Pengelolaan	5.85	5.77	5.93	3.62
Standar Pembiayaan	6.19	6.27	6.30	6.99

Realisasi ketercapaian IKK 1.1 sangat baik, yaitu mencapai 144,2%, hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Makin tingginya komitmen dinas pendidikan dan sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan;
- 2) makin banyak sekolah yang sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan;
- 3) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah yang selaras dengan pencapaian IKK 1.1.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1.1, antara lain:

KEGIATAN TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	%
Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis AN	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu	35 Peta mutu	36 Peta Mutu	100
Analisis Data Mutu	35 Kab/kota	35 Kab/Kota	100
Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu	35 Kab/kota	35 Kab/Kota	100
Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Mutu	35 Kab/kota 13 Cabdin	35 Kab/Kota 13 Cabdin	100
Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan	35 Kab/kota	35 Kab/kota	100
Pengembangan inovasi penjaminan mutu pendidikan (QA Model)	1 inovasi	1 inovasi	100



Plt. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah sedang memberikan supervisi pemenuhan mutu pendidikan kepada pendidik di salah satu sekolah

Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1.1, LPMP Provinsi telah mengembangkan inovasi-inovasi penjaminan mutu pendidikan, inovasi tersebut telah diimplementasikan oleh satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SLB.

1. Inovasi QA Model Tahun 2021

QA model sebagai salah satu inovasi yang dikembangkan LPMP Provinsi Jawa Tengah bertujuan membantu sekolah memenuhi standar nasional Pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan. Implementasi QA model telah membuahkan hasil yang memuaskan. Pencapaian tersebut dilihat dari meningkatnya capaian SNP yang diukur dari hasil audit akhir dibandingkan dengan hasil audit awal.

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG CAPAIAN INDEKS MUTU PENDIDIKANNYA LEBIH DARI 75

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Berdasarkan implementasi QA Model



Keterangan Kategori:

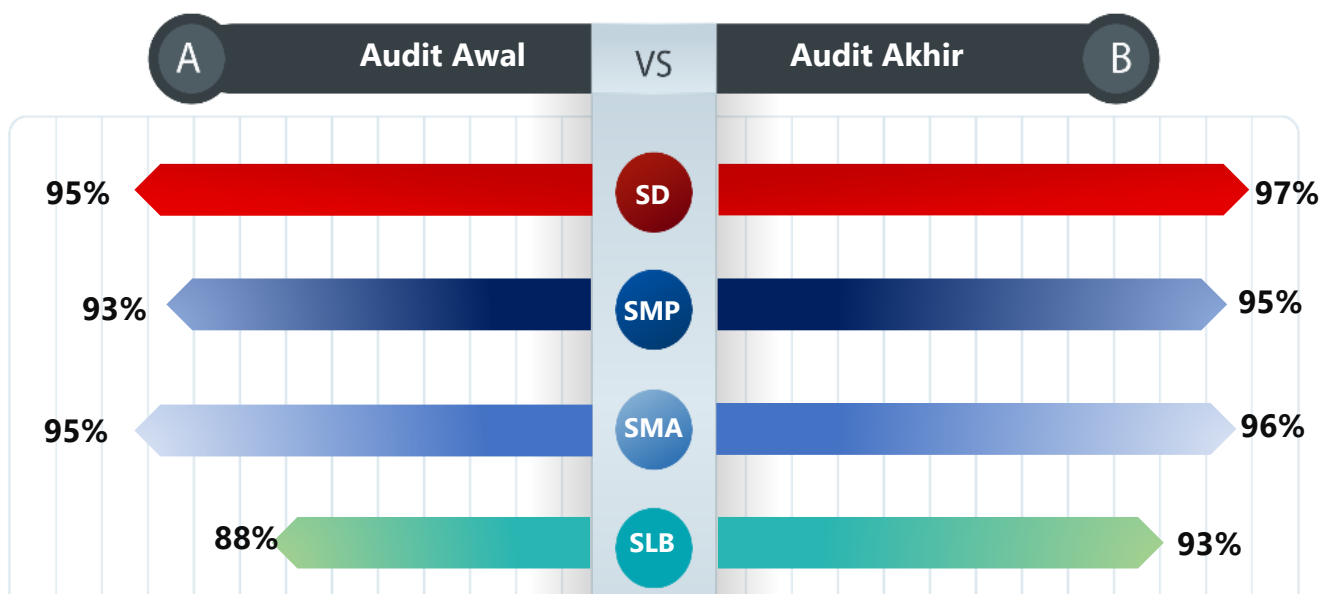
Menuju SNP 1: 0-25%; Menuju SNP 2: 26-50%; Menuju SNP 3: 51-75%; Menuju SNP 4: 76-99%; Memenuhi SNP: 100%

Pada tahun 2021 ada sebanyak 22.598 sekolah yang indeks mutu SNP nya telah mencapai 75, sedangkan jumlah sekolah yang indeks mutunya kurang dari 75 ada sebanyak 349 sekolah. Di bawah ini tabel daftar rincian jumlah sekolah pada setiap jenjang yang indeks mutunya melebihi 75 dan sekolah yang indeks mutunya kurang dari 75.

RINCIAN JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN INDEKS MUTU PER JENJANG

22.598 (Total Sekolah yang indeks mutunya lebih dari 75)	SD	18.415	349 (Total Sekolah yang indeks mutunya kurang dari 75)	SD	218
	SMP	3.225		SMP	104
	SMA	809		SMA	18
	SLB	149		SLB	9

RINCIAN RATA-RATA CAPAIAN SNP PER JENJANG

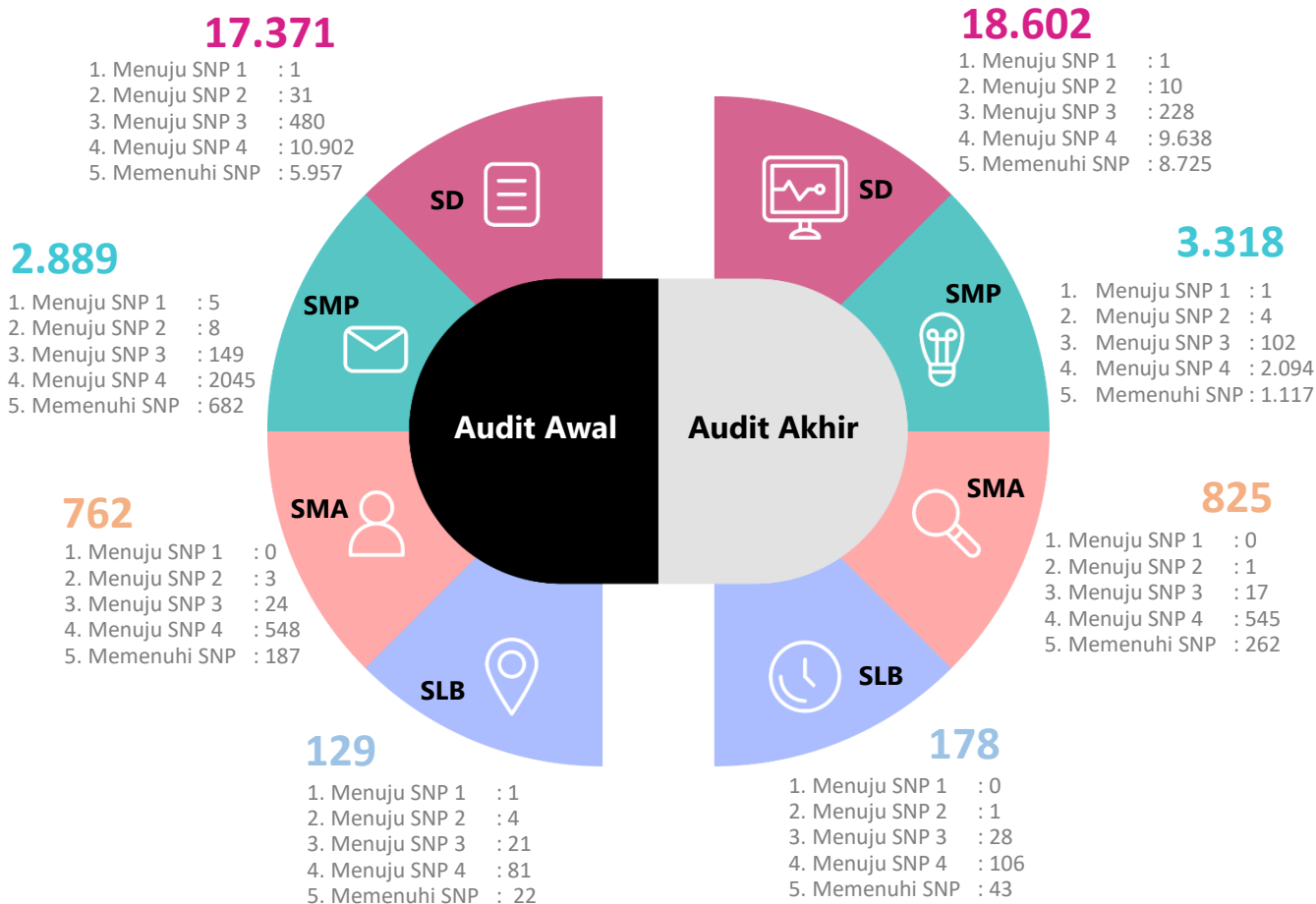


*Berdasarkan implementasi QA Model

DISTRIBUSI CAPAIAN SETIAP SNP

PER JENJANG PENDIDIKAN

*Berdasarkan implementasi QA Model



2. Inovasi SPMIgo Tahun 2021

Inovasi SPMIgo merupakan aplikasi berbasis android yang dibuat untuk membantu sekolah mengatasi permasalahan seperti masih sedikitnya sekolah yang memperoleh informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), minimnya forum diskusi terkait implementasi SPMI dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan inovasi ini telah memberikan banyak manfaat diantaranya:

- Mempermudah dan mempercepat sekolah dalam penerapan SPMI;
- Sebagai sarana komunikasi dan diskusi antar sekolah;
- Membantu sekolah dalam pemenuhan standar nasional Pendidikan;
- Efisiensi anggaran.



Aplikasi SPMIgo

Aplikasi ini juga digunakan oleh pengawas sekolah dalam rangka melakukan supervisi mutu pendidikan ke sekolah binaannya. Pada tahun 2021, dilakukan penyesuaian terkait dengan sumber data yang digunakan dalam aplikasi. Jika sebelumnya sumber data yang digunakan adalah data rapor mutu, maka untuk tahun 2021 sumber data yang digunakan adalah sumber data audit mutu.

Sampai dengan Desember 2021, SPMIgo telah digunakan oleh **lebih dari 5000** sekolah.

Permasalahan

Meskipun target yang ditetapkan pada tahun 2021 telah tercapai, namun masih dijumpai hambatan/kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKK tersebut, diantaranya:

1. Belum terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan pada seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Lambatnya ketersediaan data rapor mutu pendidikan dari pusat, mengakibatkan sekolah tidak mempunyai data yang aktual untuk menyusun rencana pemenuhan/peningkatan mutu;
3. Masih adanya Pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan tatap muka;
4. Adanya *refocusing* anggaran yang berdampak pada kuantitas dan kualitas sasaran kegiatan;

Beberapa langkah antisipasi yang telah dilakukan LPMP provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. Mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dalam mencapai 8 Standar Nasional Pendidikan;
2. Mengembangkan inovasi penjaminan mutu pendidikan berbasis audit mutu sekolah untuk membantu sekolah dalam melakukan evaluasi diri sekolah dan untuk membantu sekolah dalam perencanaan kegiatan sekolah;
3. Melaksanakan kegiatan dengan cara daring dan optimalisasi pemanfaatan LMS dalam fasilitasi peningkatan mutu;

4. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang sangat mendukung pencapaian IKK.

Untuk menjaga target IKK 1.1 tetap tercapai dan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul di tahun depan, LPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan rencana tindaklanjut/langkah antisipasi yang akan dilakukan tahun depan, rencana tindaklanjut tersebut antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait penjaminan mutu pendidikan khususnya terkait dengan perencanaan berbasis data kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan;
2. Melakukan bimbingan teknis terkait dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) kepada satuan pendidikan;
3. FGD terkait dengan peta mutu berbasis profil pendidikan.



Peserta sosialisasi buku dan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2021 di LPMP Jawa tengah 19-21 Desember 2021



Indikator Kinerja #2

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk



*Sumber data pengukuran: Setditjen PAUD Dikdasmen dan Pusat Asesmen dan Pembelajaran

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah kinerja terbaik dan sekolah kinerja terburuk sebesar 1,3%. Angka tersebut diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dan Setditjen Dikdasmen berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2021. Berikut rincian nilai kesenjangan dari kompetensi literasi, numerasi dan karakter. (lihat grafik)



Berdasarkan data pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk IKK 1.2 telah melebihi target yang ditetapkan. Dari target 5% berhasil terealisasi sebesar 1.3% dengan persentase capaian 384,6%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2020), capaian tahun 2021 mengalami peningkatan. Dari semula 4,2% di tahun 2020 menjadi 1.3% di tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), maka sejatinya capaian akhir periode Renstra telah tercapai di tahun 2021. Meskipun capaian telah melebihi target, LPMP Provinsi Jawa Tengah tetap terus menjaga agar kesenjangan antara sekolah dan kinerja terbaik dengan sekolah kinerja terburuk tetap kecil yaitu tidak melebihi 5% setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian IKK 1.2 mampu melebihi target yang ditetapkan antara lain:

1. Adanya program/kebijakan zonasi sekolah, dimana kebijakan tersebut membuat pemerataan mutu sekolah antar wilayah;
2. Sosialisasi, pendampingan, supervisi dan fasilitasi tentang pemenuhan mutu pembelajaran terutama terkait dengan kompetensi minimum dan karakter yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah kepada sekolah dan dinas pendidikan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK 1.2 ini, antara lain:

KEGIATAN TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	%
Fasilitasi Pemenuhan Mutu Pembelajaran Pola IN 1 – ON – IN 2	1.050 sekolah	1.211 sekolah	115
Pendampingan Pemenuhan Mutu Pembelajaran	1.050 sekolah	1.061 sekolah	101
Supervisi Pemenuhan Mutu Pembelajaran	525 pengawas	525 pengawas	100
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Pembelajaran	150 sekolah	150 sekolah	100
Bimtek AKM, SK, SLB/Bimtek Penyiapan Strategi Pembelajaran Menghadapi AKM, SK, SLB	1050 Sekolah	1266 sekolah	120
Pendampingan AKM ke Satuan Pendidikan	1050 sekolah	1061 Sekolah	101
Monitoring dan Evaluasi AKM Fasilitasi Berdasarkan SNP	150 sekolah	150 sekolah	100

Pendampingan Implementasi Mitigasi Risiko, PHBS, Litnum	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100
Pendampingan Implementasi LITNUM ke Sekolah	175 sekolah	174 Sekolah	99
Bimbingan Teknis Supervisi AKM	350 Pengawas	352 Pengawas	100
Supervisi Satuan Pendidikan ke Sekolah	741 Sekolah	741 sekolah	100
Rakor Sosialisasi AN	35 Kab/Kot	35 Kab/Kota	100
Pendampingan Program Sekolah Penggerak	11 Kab/Kot/Prov	11 Kab/Kot/Prov	100



LPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengembangkan inovasi dalam rangka mengetahui persentase kesenjangan hasil AKM, Survei Karakter (SK), dan Survei Lingkungan Belajar (SLB) antara sekolah kinerja terbaik dan terburuk dengan melakukan kegiatan pemetaan pemenuhan mutu pembelajaran.

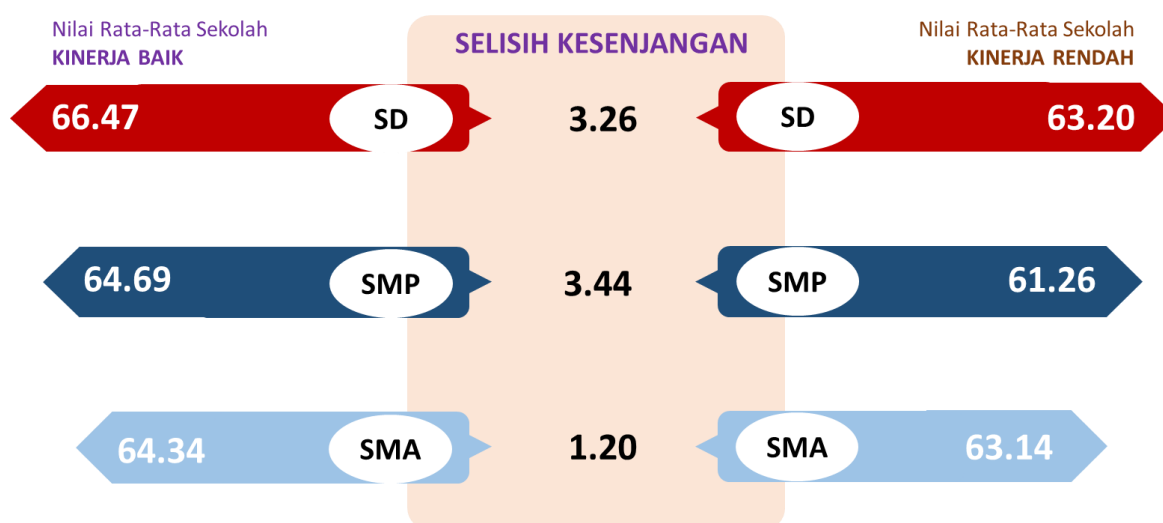
Kegiatan pemetaan yang dilakukan meliputi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Pemetaan dilakukan pada jenjang SD, SMP, dan SMA baik negeri atau swasta di seluruh kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota diikuti sebanyak 5 SD, 5 SMP, dan 2 SMA yang berasal dari sekolah berkinerja baik (akreditasi A) dan sekolah yang berkinerja rendah

(zona harapan). Setiap sekolah menugaskan 4 orang peserta didik untuk jenjang SD dan SMP, serta 10 peserta didik untuk jenjang SMA. Berikut hasil pemetaan pemenuhan mutu pembelajaran yang dilakukan LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Berdasarkan pengolahan hasil survei pemetaan AKM, karakter dan lingkungan belajar tahun 2021, angka selisih kesenjangan di Provinsi Jawa Tengah antara sekolah berkinerja baik dengan kinerja rendah tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Adapun angka selisih kesenjangan AKM, karakter, dan lingkungan belajar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar **2,63**. Sebagai informasi angka kesenjangan sesuai pengukuran dari pusat berdasarkan pelaksanaan AN 2021 adalah sebesar 1,3.

Rata-Rata Kesenjangan AKM, SK, SLB Per Jenjang

(*berdasarkan pemetaan pemenuhan mutu pembelajaran LPMP Provinsi Jawa Tengah)



Rata-Rata Nilai AKM, SK, SLB Provinsi Jawa Tengah

(*berdasarkan pemetaan pemenuhan mutu pembelajaran LPMP Provinsi Jawa Tengah)

JENIS ASESMEN NASIONAL	JENJANG	NILAI RATA-RATA		SELISIH
		KINERJA BAIK	KINERJA RENDAH	
AKM NUMERASI	SD	46.63	40.49	6.14
	SMP	39.29	33.44	5.85
	SMA	31.95	29.86	2.09
	Rata-Rata	39.29	34.60	4.69

JENIS ASESMEN NASIONAL	JENJANG	NILAI RATA-RATA		SELISIH
		KINERJA BAIK	KINERJA RENDAH	
AKM LITERASI	SD	60.13	56.06	4.07
	SMP	60.81	54.89	5.92
	SMA	64.46	63.26	1.20
	Rata-Rata	61.80	58.07	3.73
SURVEI KARAKTER	SD	83.83	81.87	1.96
	SMP	76.92	75.63	1.29
	SMA	79.17	78.27	0.90
	Rata-Rata	79.97	78.59	1.38
SLB	SD	75.27	74.39	0.88
	SMP	81.74	81.06	0.68
	SMA	81.76	81.15	0.61
	Rata-Rata	79.59	78.87	0.72
	Rata-Rata AKM, SK, SLB	65.16	62.53	2.63

Permasalahan

Dalam upaya pencapaian target IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk yang ditetapkan sebesar 5%, masih dijumpai beberapa hambatan/kendala dan permasalahan, diantaranya:

1. Rendahnya kemampuan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang berorientasi literasi, numerasi, dan pengembangan profil Pelajar Pancasila;
2. Kondisi lingkungan sekolah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif;
3. Kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yang menyebabkan pembelajaran tatap muka terganggu;
4. Keterbatasan guru dalam penggunaan *platform* pembelajaran berbasis teknologi informatika;
5. Perhitungan untuk mengetahui persentase kesenjangan belum merepresentasikan kesenjangan antara sekolah yang berkinerja tinggi dan yang berkinerja rendah;
6. Data sekolah yang membutuhkan intervensi khusus belum terpetakan.

Beberapa langkah antisipasi yang telah dilakukan LPMP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. Menyelenggarakan Webinar tentang pemanfaatan berbagai *platform* pembelajaran kepada satuan pendidikan;
2. Bimbingan Teknis Fasilitasi Pemenuhan Mutu Pembelajaran baik tatap dan tatap muka;
3. Pendampingan dan Supervisi Pemenuhan Mutu Pembelajaran baik secara daring dan luring;
4. Monitoring dan Evaluasi hasil Fasilitasi Pemenuhan Mutu Pembelajaran;
5. Sosialisasi, advokasi, dan pendampingan Pedoman Mitigasi Resiko (PMR), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Literasi dan Numerasi (Litnum);
6. Sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pemanfaatan akun belajar.id;
7. Koordinasi kesiapan pendampingan kebijakan Kemendikbud kepada pemerintah daerah;
8. Diseminasi hasil fasilitasi pemenuhan mutu pembelajaran dan hasil supervisi;
9. Pengembangan inovasi pemenuhan mutu berbasis android (SPMI Go);
10. Optimalisasi Peran Pengawas dalam mendampingi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan literasi dan numerasi.

Untuk menjaga target IKK 1.2 tetap tercapai dan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul di tahun depan, LPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan rencana tindak lanjut/langkah antisipasi yang akan dilakukan tahun depan antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi terpadu terkait sinergitas pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
2. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan kepada satuan pendidikan yang membutuhkan intervensi khusus berdasarkan hasil asesmen;
3. Melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
4. Pendampingan penyusunan dan implementasi DAK sekolah;

AKM Literasi yang diujikan terdiri dari konten teks Informasi dan teks non Informasi (fiksi) dengan proses kognitif berupa menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Ketercapaian indeks literasi tersebut diperoleh dari rerata capaian literasi pada satuan pendidikan

dengan kinerja tinggi dibandingkan dengan rerata capaian literasi pada satuan pendidikan berkinerja rendah. Realisasi semakin kecil menunjukkan kesenjangan yang rendah, atau telah terjadi pemerataan mutu pendidikan pada kemampuan literasi peserta didik.

AKM numerasi yang diujikan terdiri dari konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif berupa pemahaman, penerapan dan penalaran. Capaian indeks numerasi menunjukkan kesenjangan yang rendah antara satuan pendidikan berkinerja tinggi dengan satuan pendidikan berkinerja rendah di tiap jenjang tersebut. Dengan kata lain rendahnya kesenjangan tersebut menunjukkan pemerataan kemampuan numerasi telah tercapai.

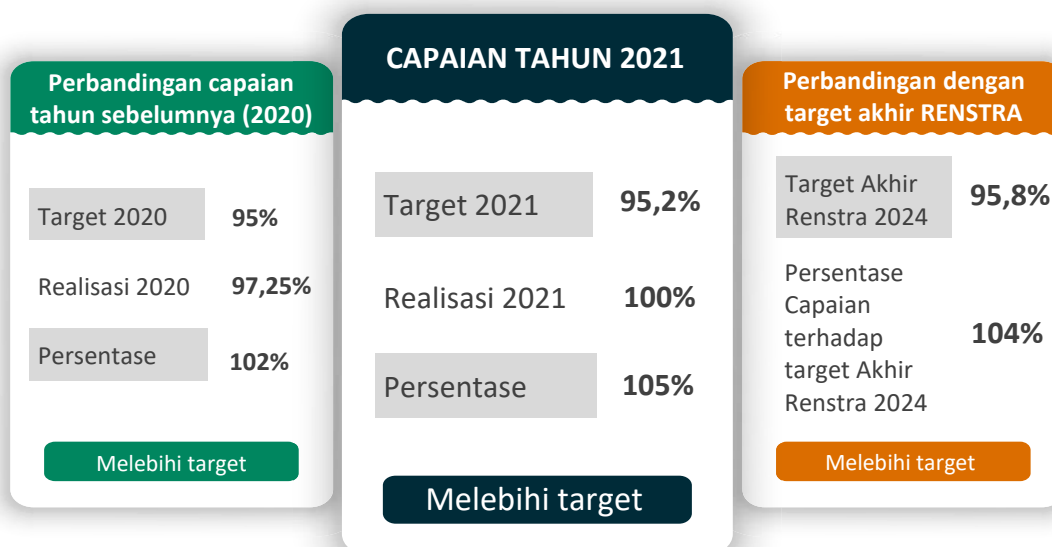
Survei Karakter yang diujikan meliputi implementasi profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, dengan aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; berkebinekaan global; bergotong royong; dan kreatif. Realisasi karakter menunjukkan rendahnya kesenjangan karakter antara sekolah kinerja terbaik dan sekolah kinerja rendah.

Survei Lingkungan Belajar (SLB) meliputi enam aspek yaitu 1) Iklim Keamanan sekolah dengan indikator berupa Keamanan dan *well being* siswa, Sikap dan keyakinan guru, dan Kebijakan dan program sekolah; 2) Iklim kebhinekaan sekolah dengan indikator berupa praktik multikultural di kelas, sikap & keyakinan guru/kepala sekolah, kebijakan & program sekolah tentang kebhinekaan; 3) indeks sosial ekonomi dengan indikator berupa pendidikan orang tua, profesi orang tua dan fasilitas belajar di rumah; 4) kualitas pembelajaran, dengan indikator manajemen kelas, dukungan afektif dan aktivasi kognitif; 5) pengembangan guru dengan indikator berupa refleksi dan perbaikan pembelajaran, dan dukungan untuk refleksi guru. Capaian realisasi kesenjangan lingkungan belajar menunjukkan rendahnya kesenjangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi pemerataan lingkungan belajar yang baik pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.



Indikator Kinerja #3

Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan

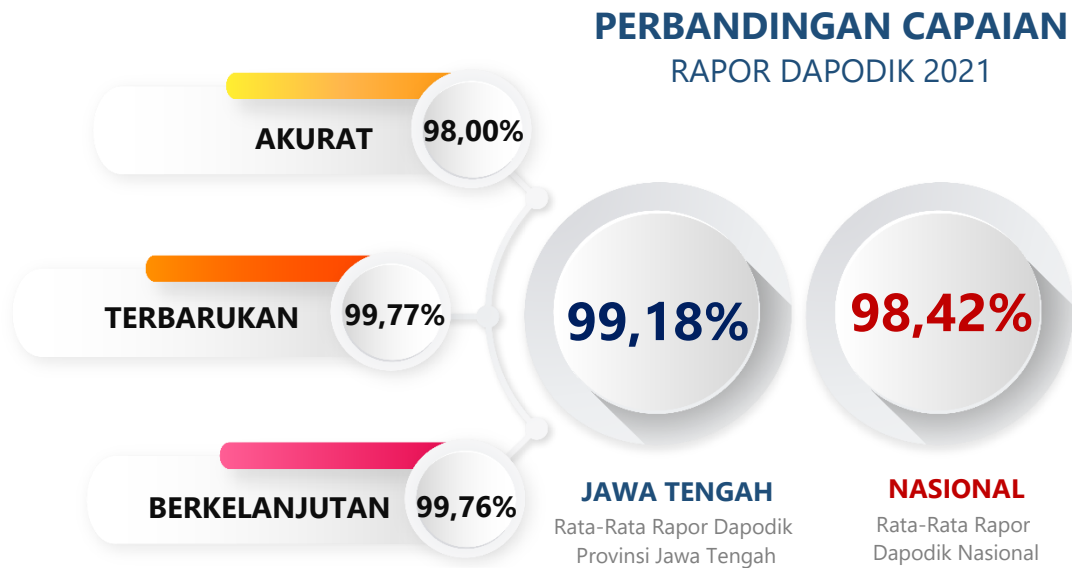


Realisasi capaian 100% pada tahun 2021 pada IKK 1.3 dihitung dari banyaknya Kab/Kota di Jawa Tengah yang memperoleh nilai rapor Dapodik minimal 95,2% dibandingkan jumlah keseluruhan Kab/Kota yang ada di Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri total ada 35 Kab/Kota, dari jumlah tersebut semuanya telah memperoleh nilai rapor di atas 95,2%, sehingga capaian untuk IKK 1.3 menjadi 100%.

Berdasar data rapor Dapodik per 13 Desember 2021, sebagaimana disampaikan oleh Setditjen Dikdasmen, yang bersumber dari website <http://dapomart.kemdikbud.go.id/>, Realisasi capaian IKK 1.3 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95,2%. Capaian sebesar 100% tersebut merupakan rapor Dapodik untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SLB. Berdasarkan data capaian tersebut, persentase kab/kota yang Dapodik dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan mutakhir di provinsi Jawa Tengah realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 105%. Meskipun telah mencapai target, ke depan perlu didorong agar kualitas Dapodik pendidikan dasar dan menengah terus meningkat.

Meskipun jika dilihat dari persentasenya semua kab/kota di Jawa Tengah telah mencapai target 95,2%, namun secara rata-ratanya, capaian rapor

Dapodik untuk tahun 2021 di provinsi Jawa Tengah baru mencapai angka 99,18%. (lihat infografik di bawah).



Sumber: (<http://dapomart.kemdikbud.go.id/>)
per 13 Desember 2021

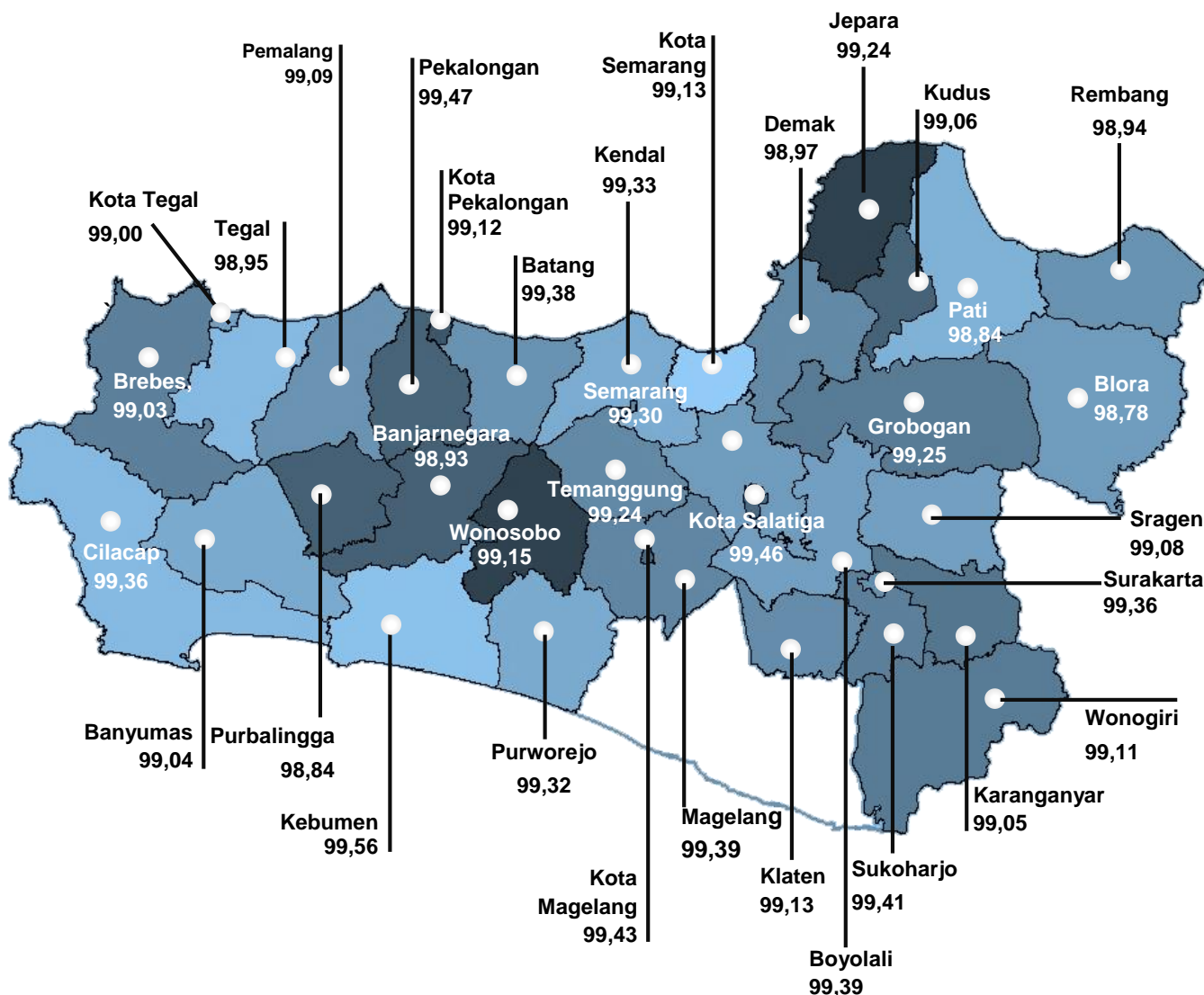
Jika dibandingkan dengan rapor tingkat nasional, rata-rata rapor Dapodik Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi. Rapor Dapodik tingkat nasional untuk tahun 2021 sebesar 98,42 sedangkan untuk tingkat provinsi Jawa Tengah sebesar 99,18 Berdasarkan data rapor Dapodik di atas, komponen akurat menjadi komponen yang nilainya paling kecil dibandingkan dengan nilai komponen terbaru dan berkelanjutan. Untuk itu, sekolah perlu didorong untuk melakukan input dan pemutakhiran data identitas sekolah, Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana dilakukan secara benar dan wajar.

23/10/21, Peserta kegiatan yang berasal dari operator dinas dan sekolah sedang melakukan analisis data hasil verifikasi dan validasi Dapodik tahun 2021



Berikut peta rapor Dapodik Kab/Kota dan jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

PETA RAPOR DAPODIK KAB/KOTA PROVINSI JATENG 2021



Realisasi ketercapaian IKK 1.3 sangat baik, yaitu mencapai 105%, hal ini dimungkinkan dipengaruhi beberapa hal diantaranya:

- 1) Makin tingginya komitmen dinas pendidikan dan kepala sekolah dalam data mutu pendidikan;
- 2) Makin tingginya kompetensi dan komitmen dari operator Dapodik baik dari tingkat Kabupaten/kota, kecamatan dan operator sekolah;
- 3) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah yang selaras untuk pencapaian IKK 1.3.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK 3 ini, antara lain:

KEGIATAN TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	%
Bimtek Verifikasi Bagi Pendamping LPMP	30 Orang	35	100
Bimtek Verifikasi Bagi Operator Kota dan Kecamatan	681 Orang	681	100
Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (23.167 SD/SMP/SMA)	100
Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (250 sekolah)	100

Permasalahan

Meskipun target yang ditetapkan pada tahun 2021 telah tercapai, namun masih dijumpai hambatan/kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKK, diantaranya:

1. Satuan Pendidikan belum optimal dalam mengupdate DAPODIK terutama diluar data PTK dan Siswa;
2. Rendahnya pengawasan dan komitmen kepala sekolah terhadap data yang diinput dalam DAPODIK;
3. Operator satuan pendidikan mengerjakan lebih dari satu aplikasi pendataan yang formatnya berbeda-beda;
4. Satuan Pendidikan belum memanfaatkan DAPODIK sebagai referensi dalam pemenuhan mutu pendidikan khususnya terkait sarpras.

Beberapa langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. Sosialisasi terkait kualitas DAPODIK kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, kepala sekolah/operator sekolah secara terus menerus;
2. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan operator Dapodik kecamatan, operator Kabupaten dan operator SMA dan SLB untuk mendorong operator sekolah melakukan validasi dan *update* DAPODIK;
3. Melakukan pendampingan pengisian DAPODIK kepada sekolah dan operator sekolah.

4. Melakukan verifikasi dan validasi ke sekolah dalam rangka meningkatkan kevalidan data DAPODIK.

Untuk menjaga target IKK 1.3 tetap tercapai dan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul di tahun depan, LPMP Provinsi Jawa Tengah melakukan rencana tindaklanjut/langkah antisipasi yang akan dilakukan tahun depan antara lain:

1. Melakukan pendampingan pengisian Dapodik kepada sekolah melalui operator tingkat pendidikan Kab/kota atau operator tingkat kecamatan dan koordinator operator dapodik jenjang SMA/SMK;
2. Melakukan peningkatan kompetensi terkait verifikasi dan validasi kepada operator kabupaten dan operator kecamatan;
3. Melakukan monitoring untuk verifikasi dan validasi pengisian dapodik pada satuan pendidikan;
4. Melakukan evaluasi kualitas dapodik, dengan memberikan penghargaan kepada kabupaten and sekolah.

Rapor Dapodik sendiri diperoleh dari nilai tiga indikator yaitu indikator akurat, berkelanjutan, dan terbaru. Dapodik merupakan pangkalan data yang berisi data terkait dengan identitas sekolah, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan sarana prasarana. Indikator Dapodik dikatakan **akurat** jika data tentang identitas sekolah, PTK, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana diinput secara benar dan wajar; dikatakan **Berkelanjutan** jika sekolah melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama empat semester berturut-turut; sedangkan dikatakan **terbarukan/mutakhir** jika sekolah melakukan pembaharuan data PTK, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana pada semester berjalan.



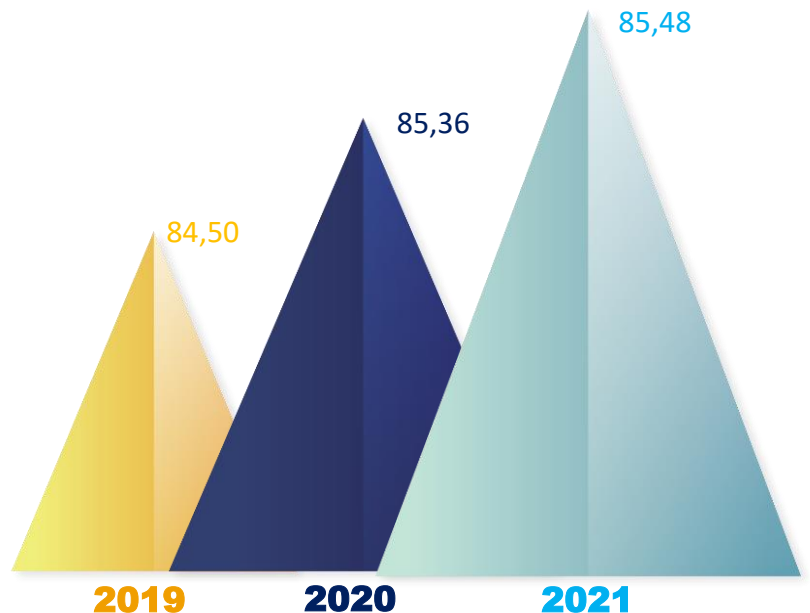
SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya tata kelola LPMP”



Tata kelola LPMP Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan secara terus menerus. Perbaikan tatakelola tersebut dibuktikan dari dinobatkannya LPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai satuan kerja dengan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bukti adanya perbaikan tatakelola di LPMP Provinsi Jawa Tengah juga terlihat dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin meningkat kualitasnya. Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan internal oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LPMP Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori/predikat **“A”** dengan interpretasi **“Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”**.



Nilai Akuntabilitas kinerja LPMP Provinsi Jawa Tengah 2019-2021



Indikator Kinerja #2.1

Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah

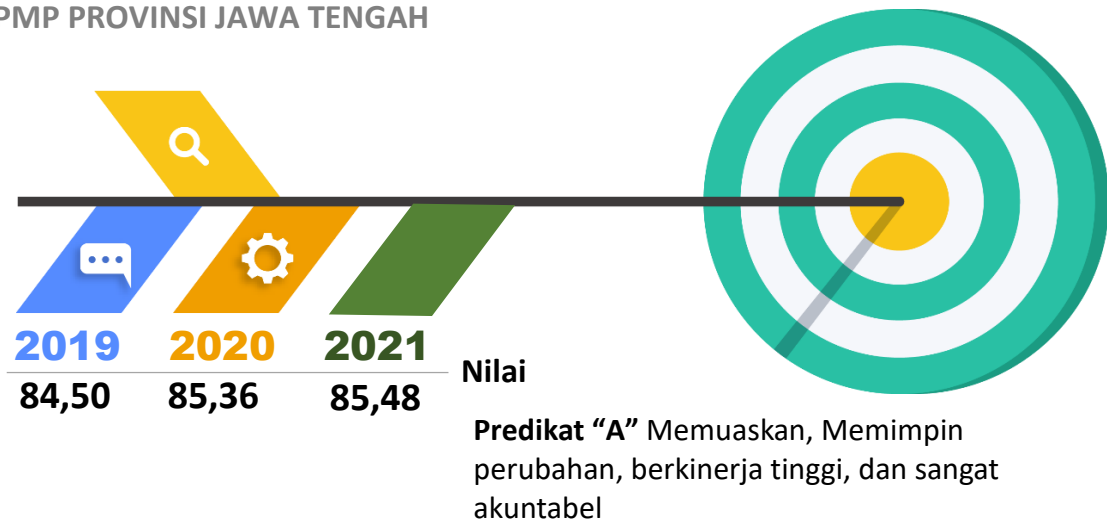


Setiap instansi pemerintah wajib mengimplementasi Sistem akuntabilitas kinerja tanpa terkecuali. Implementasi tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dengan implementasi tersebut unit kerja diharapkan menghasilkan hasil kinerja yang maksimal.

Di lingkungan Kemendikbudristek evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja bagi unit pelaksana teknis dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal. Sesuai laporan evaluasi yang dilakukan yang dilakukan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal tersebut, pada tahun 2021 implementasi sistem akuntabilitas kinerja di LPMP Provinsi Jawa Tengah mendapatkan **Predikat "A"** dengan interpretasi **"Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel"**. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk IKK 2.1 telah mencapai target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian predikat pada tahun 2021 tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya meskipun secara angka absolut ada peningkatan nilai. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024, maka sejatinya target akhir periode Renstra telah tercapai (lihat tabel di atas).

TINGKAT IMPLEMENTASI SAKIP LPMP PROVINSI JAWA TENGAH



Berikut rincian nilai implementasi SAKIP LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,32%
2	Pengukuran Kinerja	25%	24,22%
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,79%
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,15%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	19,00%
TOTAL NILAI		100%	85,48%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di LPMP Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Penyusunan rencana tindak lanjut/rencana aksi melalui bedah POK;
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja antara kepala LPMP dengan Dirjen Paud dikdas dan dikmen;
4. Sosialisasi PK kepada seluruh Warga LPMP Jawa Tengah;
5. Review laporan kinerja;
6. Workshop peningkatan kompetensi pegawai;
7. Penyusunan rencana aksi melalui aplikasi spasikita;
8. Mempublikasikan dokumen SAKIP melalui Website LPMP Jawa Tengah;
9. Menyusun rencana kinerja tahunan dalam aplikasi spasikita dan mempublikasikannya;

10. Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik minimal sebulan 1 kali;
11. Melaksanakan apel pagi dalam rangka sosialisasi kegiatan LPMP Jawa Tengah yang dilaksanakan setiap hari senin;
12. melaksanakan revisi anggaran yang digunakan untuk kegiatan-Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK;
13. melaksanakan review laporan keuangan secara berkala;
14. Melaksanakan rapat evaluasi anggaran secara Periodik;
15. Menindaklanjuti hasil dari LHE yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan;
16. Melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi spasikita;
17. Mengikuti lomba inovasi layanan yaitu inovasi QA MObel yang diselenggarakan oleh Menpan RB dan telah lolos administrasi;
18. Mengikuti lomba layanan publik yang diselenggarakan oleh MENPAN/RB;
19. Melaksanakan pendampingan ZI WBK-WBMM UPT pada 20 satker di lingkungan Direktorat Paud, Dikdas dan Dikmen dan 9 Satker diluar eselon 1 pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat perintah dari Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen dan Dari Biro Ortala dan dari 29 satker tersebut 4 memperoleh Predikat WBK;
20. Peningkatan kompetensi SDM SAKIP dengan mengikut sertakan 2 orang tim sakip pada Kegiatan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diadakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek
21. Melaksanakan penyusunan peta risiko untuk mereduksi risiko pelaksanaan kegiatan;
22. Membentuk tim tunas integritas untuk melayani tamu yang bermaksud untuk *bermarcking*/studitiru tentang ZI WBK-WBBM dan Pengawasan Internal.



Peserta Workshop mulai dari Kepala LPMP, JFT dan JFU pada sesi foto bersama dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 di Hotel Sunan Solo, 13-15 Desember 2021

Meskipun secara target capaian tahun 2021 telah tercapai, namun masih ditemui **hambatan/kendala dan permasalahan** peningkatan kualitas implementasi SAKIP Di LPMP Provinsi Jawa Tengah. Sesuai hasil penilaian oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, komponen evaluasi kinerja menjadi komponen yang nilainya masih sangat rendah dibandingkan lima komponen yang dinilai. Dari bobot 10%, baru mencapai 5,15%. Sejatinya LPMP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik setiap bulan yang dilakukan oleh pimpinan, namun sesuai evaluasi akuntabilitas yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbudristek, implementasinya dianggap masih lemah karena belum didukung dengan pemenuhan administrasi (notulen atau laporan) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja yang memadai. Format notulen belum sesuai dengan peraturan tata naskah yang berlaku di Kemendikbudristek.

Permasalahan dan kendala lain yang ditemui dalam pencapaian target IKK 2.1 di tahun 2021, antara lain:

1. Pandemi covid 19 yang menyebabkan terhambatkan kegiatan atau adanya penundaan kegiatan tatap muka sampai dengan bulan september sehingga kegiatan tatap muka menumpuk pada bulan Oktober, November dan Desember;
2. Terjadi beberapa kali refocusing anggaran.

Beberapa langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. Melakukan reuiu Renstra LPMP Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 setiap tahun;
2. Mengembangkan inovasi dalam rangka pencapaian dan pengukuran capaian IKK;
3. Melakukan bedah POK untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan dengan target IKK yang ada dalam Perjanjian kinerja;
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap awal tahun dengan berdasar pada capaian informasi dalam LAKIP;
5. Melakukan evaluasi kinerja rencana aksi/kegiatan setiap bulan bersama penanggungjawab kegiatan/koordinator;
6. Mengembangkan inovasi-inovasi untuk mendukung pencapaian target IKK yang ditetapkan.

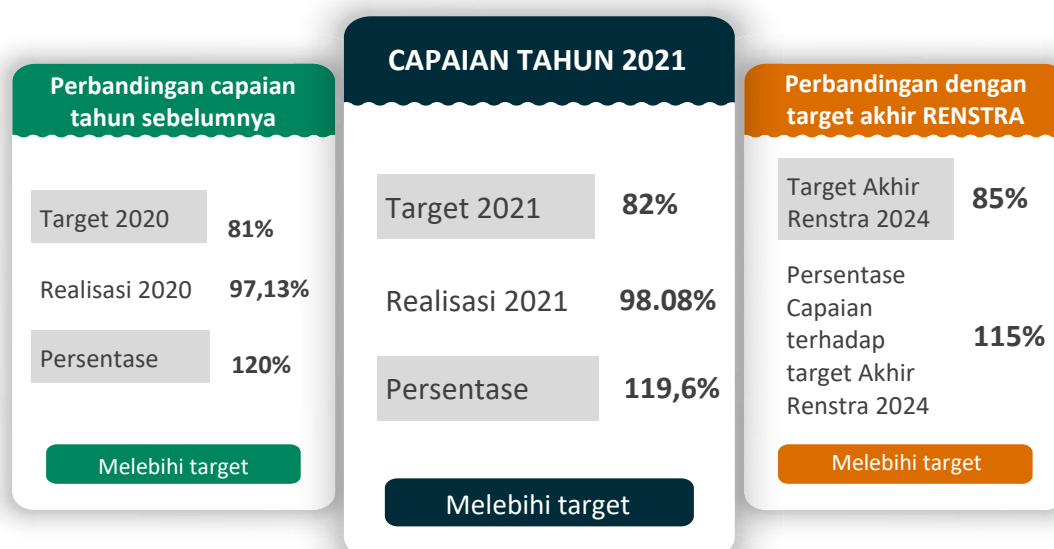
Beberapa langkah antisipasi atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, sehingga akuntabilitas kinerja dapat meningkat kualitasnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim SAKIP internal untuk melakukan pemenuhan administrasi kegiatan evaluasi kinerja dengan melakukan penyesuaian format notulen yang digunakan;
2. Melakukan koordinasi dengan tim SAKIP untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Biro Perencanaan;
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan tim evaluator dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal sebagai pembina SAKIP di Kemendikbudristek untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan hasil evaluasi.



Indikator Kinerja #2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L



Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan yang terhubung melalui aplikasi *spasikita* dari Kemdikbudristek, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L untuk tahun 2021 sebesar 98,08%. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa target untuk IKK 2.2 telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 82% terealisasi 98.08%, dengan persentase capaian sebesar 119,6%. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 98.08 diperoleh dari akumulasi nilai EKA sebesar 99,78 dan nilai IKPA sebesar 95,53.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0.95 poin, dari sebelumnya 97,13 menjadi 98,08. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024) sebesar 85% maka target yang ditetapkan tersebut telah terlampaui dengan persentase sebesar 115%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L selama tahun 2021 antara lain:

1. Membentuk Tim PIPK untuk melaksanakan pengendalian atas laporan keuangan;
2. Review Laporan Keuangan;
3. Workhop peningkatan kompetensi Pegawai;
4. Rapat evaluasi rutin pencapaian kinerja anggaran;
5. Pengendalian atas laporan keuangan oleh TIM PIP;
6. Mengikuti bimbingan teknis penilaian PIPK yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen;
7. Membuat peta resiko atas pelaksanaan anggaran
8. Menyusun laporan keuangan setiap Tri Wulan dan direview oleh SPI;
9. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
10. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja keuangan secara periodik;
11. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang dilaksanakan setiap bulan;
12. Melakukan revisi RKAL yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKK;
13. Melakukan rekon data internal antara data Keuangan dan data barang milik negara;
14. Melakukan rekon eksternal dengan KPPN sebelum batas waktu yang ditentukan;
15. Melakukan koordinasi dengan koordinator persediaan;
16. Operator persediaan melakukan stock opname persediaan setiap semester;
17. Operator persediaan mengirim data ke BMN setiap bulan;
18. Melakukan telaah Laporan Keuangan setiap triwulan;
19. Melakukan koordinasi Internal di LPMP Jawa Tengah setiap Bulan;
20. Melakukan telaah Laporan Keuangan oleh TIM PIPK;
21. Mengisi Laporan Tahunan pada aplikasi Spasikita.



Suasana rapat dalam kegiatan evaluasi kinerja dan bedah POK di tahun 2021 yang dihadiri dari unsur pejabat struktural, koordinator fungsi dan penanggungjawab kegiatan

Permasalahan dan hambatan yang dijumpai LPMP Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L antara lain:

1. Pandemi covid 19 yang menyebabkan terhambatnya kegiatan atau adanya penundaan kegiatan tatap muka s.d. bulan september sehingga kegiatan tatap muka menumpuk pada bulan Oktober, November dan Desember;
2. Terjadi beberapa kali refocusing anggaran.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan di tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan yang muncul, antara lain:

1. memfokuskan kegiatan pada kegiatan yang langsung berkaitan dengan pencapaian IKK 2.2;
2. mengembangkan berbagai inovasi dalam mendukung perbaikan tata kelola melalui Aplikasi Lentera.

Sedangkan rencana tindak lanjut atau langkah antisipasi yang akan dilakukan ke depan agar permasalahan yang muncul tersebut tidak dijumpai kembali antara lain dengan 1) meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab petugas penyusun laporan kegiatan baik melalui kegiatan *capacity building* atau melalui kegiatan apel pagi yang dilakukan setiap hari senin; 2) membuat aturan baku dalam bentuk POS penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh instansi pemerintah. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai atas implementasi anggaran dengan bobot 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen.

Penilaian pada aspek implementasi dilakukan dengan melihat empat indikator yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan indikator kinerja penilaian IKPA ada 13 indikator yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Return SP2D, Pagu minus, dan Dispensasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan "terwujudnya tatakelola LPMP yang baik", LPMP Provinsi Jawa Tengah mengembangkan inovasi yang berbasis sistem informasi untuk memudahkan pemberian layanan yang prima kepada *stakeholders*. Inovasi tersebut diantaranya aplikasi SIMPADU DIKBUD dan aplikasi LENTERA.

INOVASI SIMPADU DIKBUD adalah inovasi pelayanan yang berbasis online

(*web* dan *android*) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan secara cepat, murah,



Aplikasi SIMPADU DIKBUD atau dapat diakses di laman ult.lmpjateng.go.id



waktu pelayanan tidak terbatas, dan mudah diakses. Inovasi ini dibuat untuk mengatasi permasalahan antara lain banyaknya permohonan informasi diluar tugas dan fungsi LPMP seperti akreditasi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sertifikasi.

Inovasi ini mengkolaborasikan instansi pemerintah lain seperti dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota, cabang dinas, BAN S/M, dan UPT Kemendikbudristek yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta memberikan layanan ke masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa layanan yang diakomodir antara lain penjaminan mutu Pendidikan, penilaian angka kredit, NUPTK, rapor mutu, Pendidikan profesi guru, akreditasi, sertifikasi dan layanan lain seperti cagar budaya, pengawas, kepala sekolah, PAUD Dikmas. Kepuasan layanan pada SIMPADU DIKBUD sangat tinggi. Dari hasil survei layanan yang dilakukan secara periodik setiap bulan tingkat kepuasannya mencapai rata-rata 99%.

Tingkat Kepuasan Pengguna



99%

Sangat Puas

1%

Lainnya (puas, cukup, kurang)

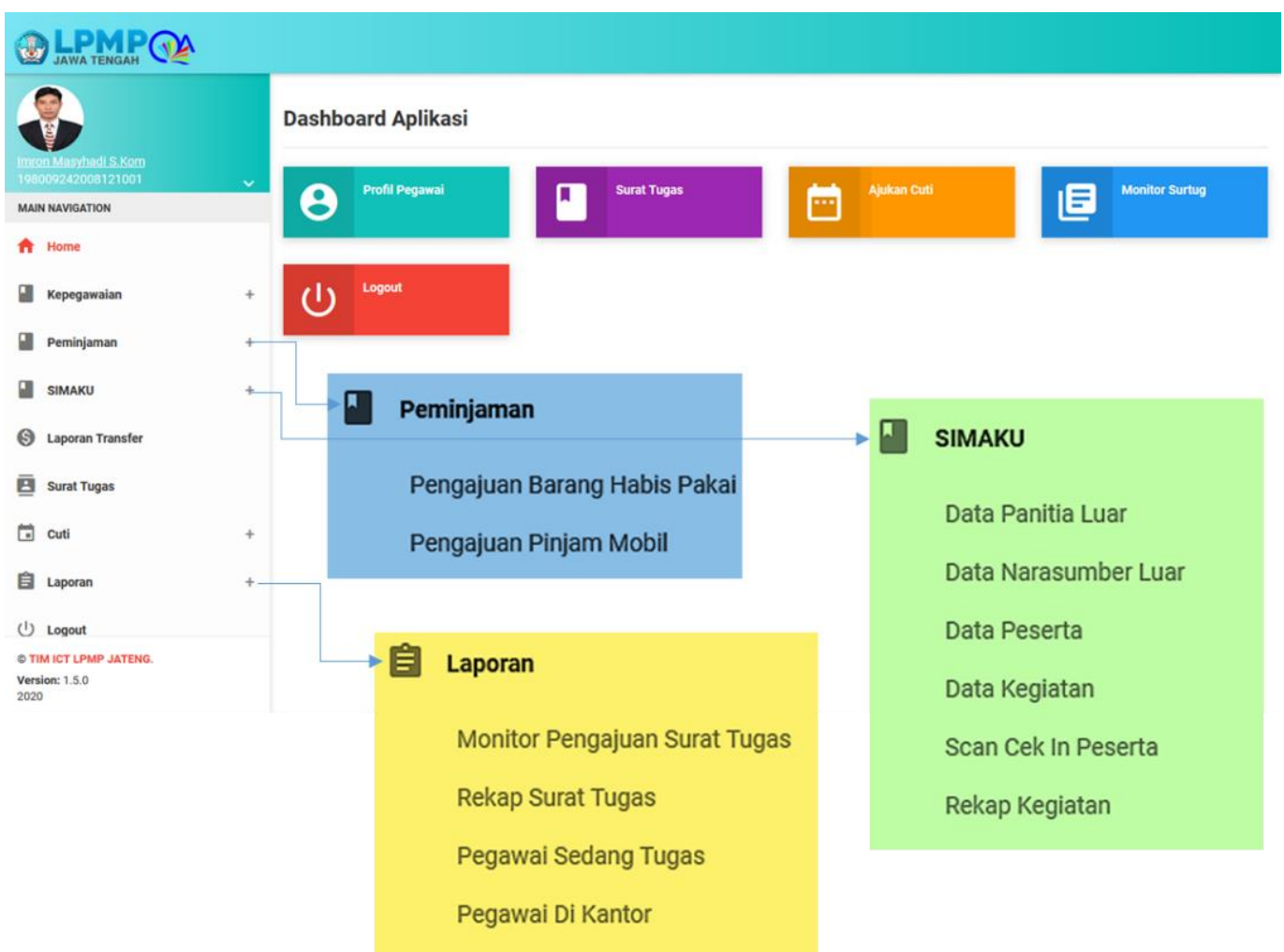
Pengguna layanan
Periode Mei 2019 s.d. 31 Agustus 2021:

68.806 orang

INOVASI LENTERA (Layanan Elektronik Terpadu) merupakan inovasi aplikasi yang bertujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan baik kepada pihak internal LPMP Provinsi Jawa Tengah sehingga tercipta tata kelola kelembagaan yang cepat, transparan dan akuntabel.

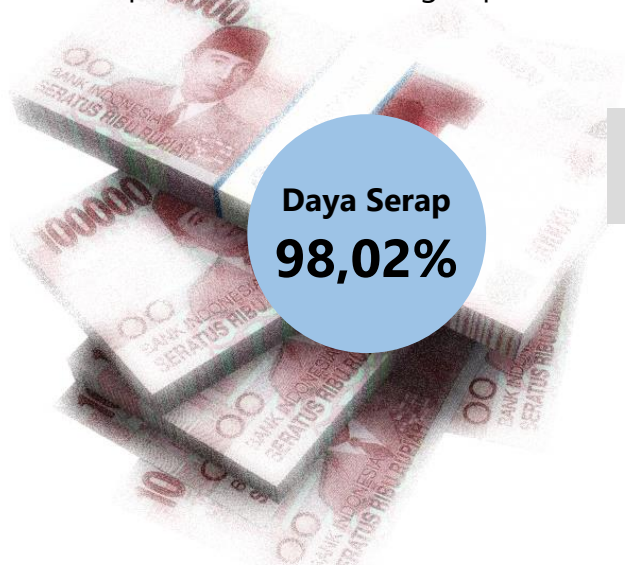
Beberapa pelayanan yang disediakan dalam aplikasi ini antara lain sistem informasi manajemen surat tugas, pengajuan cuti, data kepegawaian, inventaris BMN, pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan.

Inovasi LENTERA ini telah diadopsi beberapa LPMP lain seperti LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama DANGSANAK, dan LPMP Provinsi DIY dengan nama Aplikasi Surat tugas.



B. REALISASI ANGGARAN

LPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menerima pagu anggaran sebesar Rp34.054.314.000. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp33.379.873.475 dengan persentase daya serap anggaran sebesar 98,02%.



PAGU ANGGARAN 2021
Rp34.054.314.000,-

REALISASI ANGGARAN 2021
Rp33.379.873.475,-

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
IKK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			
IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	633.905.000	628.009.500	99,07%
IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	6.866.232.000	6.852.840.472	99,80%
IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	1.137.479.000	1.109.199.972	97,51%
SK2. Meningkatnya tatakelola LPMP			
IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah			
IKK 2.1 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	25.416.698.000	24.789.823.531	99,45%

Selama periode tahun 2021, LPMP Provinsi Jawa Tengah mengalami revisi DIPA sebanyak sembilan kali, yaitu:

1. Revisi 1 pada tanggal 20 Mei 2021, yaitu berupa revisi halaman III DIPA terkait rencana penarikan dana;
2. Revisi 2, tanggal 7 Juni 2021, merupakan revisi terkait pemotongan pagu belanja pegawai sebesar Rp 905.915.000,-. Kebijakan pemerintah mengenai pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN, yang meniadakan komponen tunjangan kinerja. Hal ini diakibatkan karena adanya penghematan belanja pegawai untuk refocusing penanganan pandemi Covid 19;
3. Revisi ke 3 tanggal 9 Juli 2021, merupakan revisi penarikan Halaman III DIPA, terkait rencana penarikan dan revisi antar komponen;
4. Revisi ke 4 tanggal 26 Juli 2021 merupakan revisi terkait refocusing belanja barang untuk digunakan kegiatan belanja pemerintah di unit utama lain. Pagu DIPA mengalami pemotongan sebesar Rp4.238.157.000,00 Laporan Keuangan LPMP Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Unaudited 26 Catatan Atas Laporan Keuangan;
5. Revisi ke 5 tanggal 5 Agustus 2021 merupakan revisi terkait refocusing belanja barang untuk digunakan kegiatan belanja pemerintah di unit utama lain. Pagu DIPA mengalami pemotongan sebesar Rp2.381.634.000,00;
6. Revisi ke 6 tanggal 14 Oktober 2021 merupakan merupakan revisi penarikan Halaman III DIPA, terkait rencana penarikan dan revisi antar komponen;
7. Revisi ke 7 tanggal 9 November 2021, merupakan revisi terkait refocusing belanja barang untuk digunakan kegiatan belanja pemerintah di unit utama lain. Pagu DIPA mengalami pemotongan sebesar Rp49.518.000,00;
8. Revisi ke 8 tanggal 30 November 2021, merupakan revisi terkait halaman 3 DIPA;
9. Revisi ke 9 tanggal 23 Desember 2021, merupakan revisi terkait pemutakhiran POK.



Efisiensi Anggaran

LPMP Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp873.886.000,-** dari total anggaran sebanyak RP34.054.314.000,-.

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai target dan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari metode tatap muka secara langsung menjadi jarak jauh dengan strategi *video conference*, hal ini yang secara langsung mengefisiensi anggaran perjalanan dinas. Efisiensi juga diperoleh dengan adanya perubahan pelayanan yang diberikan, yaitu yang semula pelayanan secara manual dirubah dengan memanfaatkan sistem informasi.

Anggaran hasil efisiensi digunakan/dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1.2 yaitu Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk dengan berbagai kegiatan seperti dibawah ini:

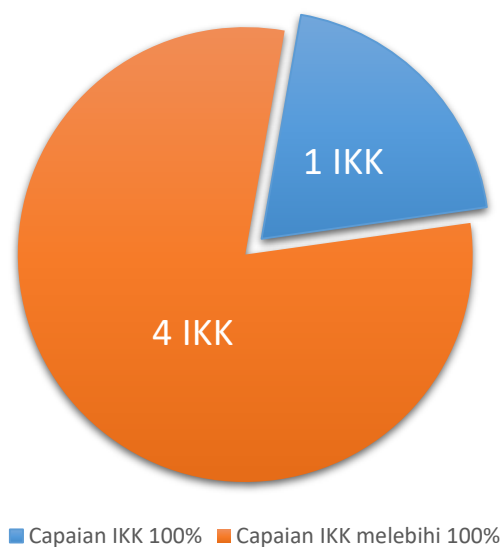
1. Workshop Review Instrumen literasi, numaerasi (AKM), SK, dan SLB
2. Pelaksanaan Uji Coba terbatas instrumen literasi dan numerasi (AKM)
3. Ujicoba Pengembangan Instrumen Pemetaan Pemenuhan Mutu Pembelajaran

BAB IV PENUTUP



L PMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menetapkan dua sasaran kegiatan, yaitu 1) meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, dengan tiga indikator kinerja dan 2) meningkatnya tata kelola LPMP, dengan dua indikator kinerja.

Dari lima indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran kegiatan tersebut, empat indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (>100%) yang ditetapkan sedangkan satu indikator kinerja kegiatan realisasinya mencapai target (100%).



Dari segi penyerapan anggaran, LPMP Provinsi Jawa Tengah berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp33.379.873.475** dari total anggaran **Rp34.054.314.000**. dengan persentase **98,02%**.

Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:

1. Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan baik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, satuan pendidikan dan LPMP;
2. Peningkatan komitmen kepala sekolah dalam peningkatan kualitas data Dapodik;

Untuk meningkatkan kinerja LPMP Jawa Tengah ke depan, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan peta mutu pendidikan;
2. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi kepada satuan pendidikan terkait pemenuhan atau peningkatan standar nasional pendidikan;
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada kepala satuan pendidikan, operator Dapodik tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan terkait dengan Dapodik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



2. Pengukuran Kinerja



3. Pernyataan
telah direviu



Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pit. Kepala LPMP Jawa Tengah
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Harmanto, M.Si

Jabatan : Pit. Kepala LPMP Jawa Tengah

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**



Jumeri, S.TP.,M.Si.

Pit. Kepala LPMP Jawa Tengah



Drs. Harmanto, M.Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 26.805.059.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 14.824.479.000
		TOTAL	Rp. 41.629.538.000

Jakarta, 29 Januari 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Jumeri, S.TP., M.Si.

Plt. Kepala LPMP Jawa Tengah



Drs. Harmanto, M.Si

Perjanjian Kinerja Revisi



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pit. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

Jabatan : Pit. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Pit. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 25.416.698.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 8.637.616.000
		TOTAL	Rp. 34.054.314.000

Semarang, 29 November 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pit. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah



Jumeri, S.TP., M.Si.



Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.

Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi			
				Target Kinerja	%	Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	27,4	8.637.616.000	39,51	144,2 %	8.590.049.944	97.53%
	IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5		1,3	384,6 %		
	IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,2		100	105%		
SK2. Meningkatnya tatakelola LPMP	IKK 2.1 Predikat SAKIP	A	25.416.698.000	A	100%	24.789.823.531	99.45%
	IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL	82		98.08	119,6 %		

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Daya Serap
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	25.416.698.000	24.789.823.531	97.45%
2	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	8.637.616.000	8.590.049.944	99.45%
Total Anggaran		34.054.314.000	33.379.873.475	98.02%

Penyataan telah direviu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)
Laman : www.lpmj Jateng.go.id Email : lpmj-jateng@lpmj Jateng.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja LPMP Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen LPMP Provinsi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Kinerja telah disajikan secara Akurat, Andal dan Valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keyakinan keandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Kinerja.

Tim Reviu,

No	Nama	Unit Kerja/ Jabatan	Tanggal	Tandatangan
1	Sudaryanta, S.Pd., M.Si.	LPMP Jawa Tengah/ Ketua Tim Review	25 Januari 2022	
2	Sri Wahyu Puji Astuti, S.Pd., M.Si	LPMP Jawa Tengah/ Sekretaris Tim Review	25 Januari 2022	
3	Dra. Suminarsih, M.Si.	LPMP Jawa Tengah/ Perwakilan Anggota	25 Januari 2022	

